

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) Melengkapi Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (2) Mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas. (3) Menindaklanjuti rekomendasi Menpan tentang penilaian Pembanguana ZI tahun 2016. Untuk itu perlu disusun program kerja pembangunan Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan

2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman dan tindakan dalam membangun zona integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM.

### C. SASARAN

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN PENGUNGKIT</b>	<b>BOBOT (60%)</b>
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

<b>NO</b>	<b>UNSUR INDIKATOR HASIL</b>	<b>BOBOT (40%)</b>
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

### D. PROGRAM KERJA

#### I. MANAJEMEN PERUBAHAN

##### a. TARGET

1. Meningkatnya komitmen seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam membangun Zona Integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Klungkung dalam membangun Zona Integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM BBM

3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi perubahan.

b. RENCANA AKSI

1. Melakukan penandatanganan Fakta Integritas untuk mengingatkan kembali tentang komitmen seluruh jajaran.
2. Menanamkan nilai-nilai Pelayanan Publik kepada seluruh jajaran melalui morning briefing pada waktu apel pagi.
3. Melakukan kegiatan meningkatkan rasa kebersamaan melalui kegiatan pembangunan tim.
4. Menyusun kegiatan inovasi yang telah diimplemtasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

II. PENATAAN TATALAKSANA

a. TARGET

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM

b. RENCANA AKSI

1. Mendokumentasikan dengan baik seluruh SOP kegiatan, Peta bisnis, E kinerja dan E surat yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang berkaitan dengan kegiatan utama;
2. Monitoring pelaksanaan SOP;

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

a. TARGET

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM;

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM;
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM;
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM;
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona Integritas mempertahankan predikat WBK menuju WBBM

b. RENCANA AKSI

1. Mendokumentasikan dengan baik cascading dinas, kinerja individu, Perjanjian Kinerja, Peta jabatan, SKP dan Analisis Beban Jabatan;
2. Mengumpulkan dokumen aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku dan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

#### IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS

a. TARGET

1. Meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintahan

b. RENCANA AKSI

1. Mendokumentasikan dengan baik dokumen Lakip, Renstra, IKU, IKI;
2. mengumpulkan dokumen proses penyusunan dokumen diatas

#### V. PENGUATAN PENGAWASAN

a. TARGET

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

b. RENCANA AKSI

1. Melakukan resosialisasi pelaksanaan penguatan pengawasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung
2. Melakukan evaluasi e-Kinerja, SKP, APIP dan Kinerja Individu;
3. Mengaplikasikan pelaksanaan penguatan pengawasan

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. TARGET

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

b. RENCANA AKSI

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat;
2. melaksanakan pelayanan keliling.
3. Melengkapi atribut pada ruang pelayanan;

Ditetapkan di : Semarapura  
pada tanggal : 20 Desember 2022

